
Samuka Vol 5 No 2 : hlm 125-133

SAMUKA

Jurnal Samudra Ekonomika

<https://ejurnalunsam.id/index.php/jse>

ANALISIS DETERMINASI KEMISKINAN DI INDONESIA STUDI KASUS (2016-2019)

Vania Grace Sianturi¹ M. Syafii², Ahmad Albar Tanjung³

¹ Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan

^{2,3} Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan

vgraces295@gmail.com

Received: September 2021; Accepted: September 2021; Published: September 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dengan data sekunder. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu menggabungkan data time series dan cross section selama 4 tahun yaitu tahun 2016 sampai 2019. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan alat analisis Eviews10. Hasil penelitian berdasarkan metode analisis regresi data panel menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Secara parsial, tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : *Tingkat Pertumbuhan Penduduk, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan*

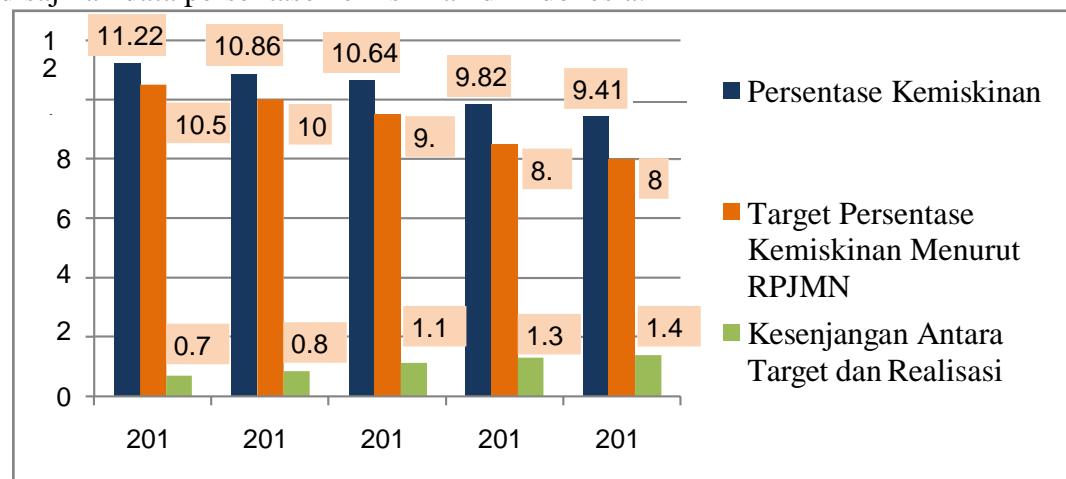
PENDAHULUAN

Millenium Development Goals (MDGs) atau lebih dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Milenium merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Millenium oleh 189 anggota Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 2000. Adapun beberapa target yang dimuat dalam MDGs adalah kemiskinan dan kelaparan, mengupayakan pendidikan dasar untuk seluruh lapisan masyarakat, mengupayakan kesetaraan gender juga pemberdayaan bagi perempuan, peningkatan kesehatan ibu juga menekan angka kematian anak, memberantas HIV/AIDS serta penyakit menular lainnya, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global guna peningkatan pembangunan. Namun, dari seluruh tujuan tersebut mengurangi jumlah penduduk miskin merupakan tujuan pertama dalam MDGs (Wahyunigsih, 2017). Setelah tahun 2015 MDGs

kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dimulai dari tahun 2015-2030. Permasalahan seputar kemiskinan sudah menjadi permasalahan yang krusial bagi sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia. Seseorang dinyatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan yang dianggap paling penting, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang maupun sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal. Upaya penanggulangan di Indonesia sudah menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah yang dituang dalam Recana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN kemudian dibagi menjadi empat periode Recana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang dimana tahun 2015 sampai tahun 2019 masuk ke dalam periode ketiga.

Berikut disajikan data persentase kemiskinan di Indonesia:



Gambar 1. Persentase Kemiskinan, RPJMN serta Kesenjangan antara Target Penurunan Kemiskinan dan Realisasinya di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa persentase kemiskinan tertinggi berada pada tahun 2015 dan berangsurn menurun sampai tahun 2019. Namun penurunan persentase kemiskinan ini nyatanya belum memenuhi target pemerintah yaitu 8% di tahun 2019. Hal ini didukung pula oleh data yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara target penurunan kemiskinan dan realisasinya masih terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Terdapat beberapa pendapat ahli tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan. Pertama, menurut Malthus, salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang pesat akan berdampak negatif pada kecukupan ketersediaan pangan dan pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan kronis. Kedua, menurut Kuncoro ketimpangan dalam kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kualitas sumberdaya manusia yang dicerminkan melalui IPM juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Ketiga, menurut Mankiw bahwa dengan adanya peningkatan PDRB maka akan meningkatkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan yang nantinya dapat dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan. Terakhir, menurut Sukirno bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor yang ikut pula berpengaruh pada kemiskinan. Pendapatan masyarakat akan maksimum apabila kondisi penggunaan tenaga kerja dalam situasi penuh dapat terwujud. Oleh karena itu, keseluruhan faktor inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode 2016-2019.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis menggunakan regresi data panel dan kemudian menginterpretasikannya guna penarikan

kesimpulan. Adapun yang menjadivariabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Kemiskinan, Inflasi dan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2019

No.	Variabel	Parameter	
1	Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	Ribu jiwa
2	Tingkat pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Persen
3	IPM	IPM	Indeks
4	Pertumbuhan ekonomi	PDRB harga konstan	Miliar rupiah
5	Ketimpangan distribusi pendapatan	Gini rasio	Rasio
6	Tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan uji regresi panel, maka sebelumnya harus dilakukan pemilihan model estimasi, untuk menentukan apakah model yang dipakai adalah *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Maka pada tahap pertama terlebih dahulu dilakukan Uji Chow dan dilanjutkan dengan Uji Hasuman. Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik antara CEM dan FEM.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

— Redundant			
Fixed Effects			
Tests Pool:			
PROVINSI			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1024.134234	(33,97)	0.0000
Cross-section Chi-square	796.452106	33	0.0000

Sumber : *Eviews10* (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-Square* adalah sebesar 0,0000 yang berarti nilai probabilitas *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-Square* lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Maka, selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk memilih model terbaik antara FEM dan REM.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	64.671711	5	0.0000

Sumber : *Eviews10* (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk *cross-section random* adalah sebesar 0,0000 yang berarti nilai probabilitas *cross-section random* lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *fixed*

effect model. Untuk selanjutnya maka akan dilakukan interpretasi pada regresi data panel guna menjawab tujuan penelitian.

Tabel 4. Hasil Estimasi FEM

Variabel	Coefficient	Prob.
C	7.018223	0.0000
TPP	0.023743	0.0000
IPM	-0.008904	0.0269
PE	-0.059857	0.5674
KDP	0.082073	0.6124
TPT	2.88E-05	0.9935
R-squared	0.999258	
Adjusted R-squared	0.998968	
F-statistic	3439.252	

Sumber : *Eviews10* (Data Diolah)

Berdasarkan hasil estimasi ini maka disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3439,252 > 2,44$). Artinya, tingkat pertumbuhan penduduk, IPM, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran berpengaruh simultan terhadap kemiskinan di Indonesia. Nilai R^2 menunjukkan angka sebesar 0,9992, artinya tingkat pertumbuhan penduduk, IPM, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,999258 atau $R^2 = 99,92\%$, yang berarti tingkat pertumbuhan penduduk, IPM, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran mempengaruhi kemiskinan sebesar 99,92% dan sisanya 0,08% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

Berdasarkan Interpretasi Koefisien *Fixed Effect Model* 34 Provinsi di Indonesia , dilihat Provinsi Jawa Timur memiliki nilai konstanta paling tinggi yaitu sebesar 8,136 artinya apabila variabel tingkat pertumbuhan penduduk, IPM, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan disribusi pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka sama dengan nol, maka besarnya kemiskinan di Jawa Timur adalah sebesar 8,136%. Dengan kata lain, Jawa Timur menyumbang angka kemiskinan tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Adapun nilai koefisien regresi untuk setiap varibel dalam penelitian dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{LogKMS} = 7,018223 + 0,023743\text{TPP} - 0,008904\text{IPM} - 0,059857\text{LogPE} + 0,082073\text{KDP} + 0,0000288\text{TPT}$$

Keterangan:

LogKMS = Hasil data logaritma jumlah penduduk miskin

TPP = Tingkat pertumbuhan penduduk

IPM = Indeks pembangunan manusia

LogPE = Hasil logaritma pertumbuhan ekonomi

KDP = Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia

TPT = Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai *coefficient* tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,023743 dengan nilai probabilitas 0,0000. Artinya tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil ini juga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 1%, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,023743 ribu jiwa. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak

terkendali akan meningkatkan kemiskinan. Peningkatan kemiskinan terjadi karena pertumbuhan penduduk menurut deret ukur sedangkan pertumbuhan bahan makanan meningkat menurut deret hitung. Menurut Malthus bahwa sumber daya yang ada di bumi tidak mampu mengimbangi kebutuhan dari populasi manusia yang terus meningkat. Hal ini akhirnya mengakibatkan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas justru berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya yang sifatnya terbatas. Inilah yang akan mendorong manusia mendekati garis kemiskinan dikarenakan ketatnya persaingan dalam upaya memenuhi kebutuhan. Selain bahan makanan, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan menyebabkan timbulnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, namun di lain sisi lapangan pekerjaan justru terbatas. Hal ini akan mengakibatkan penduduk yang tidak mampu bersaing akan kalah dan menganggur atau bekerja namun dengan pendapatan yang rendah yang akan menyebabkan kemiskinan pun meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukomo (2019) bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Sulastri (2017) menemukan hasil bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dikarenakan jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif . Pertumbuhan penduduk dinilai mampu memacu pembangunan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai *coefficient IPM* sebesar -0,008904 dengan nilai probabilitas 0,0269, artinya IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan IPM sebanyak 1 indeks , maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,008904 ribu jiwa. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru yang menekankan arti pentingnya peran dari pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian guna meningkatkan produktivitas manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa investasi yang dilakukan pada pendidikan maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya peningkatan pada pendidikan maka akan mendorong produktivitas kerja sehingga perusahaan akan memberikan gaji yang lebih tinggi yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut hingga akhirnya mengurangi angka kemiskinan. Usaha lain yang dapat dilakukan guna percepatan kualitas pembangunan manusia, khususnya di pedesaan dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah dana desa serta memberikan kewenangan penuh pada desa dalam pengelolaan dana yang diterima. Upaya ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Simangunsong *et. al.*(2021) bahwa terdapat pengaruh yang positif antara dana desa terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kotambunan *et. al.* (2016) bahwa IPM manusia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Mukhtar *et. al.* (2019) bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Sayifullah dan Gandasari (2016) menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Menurut peneliti tersebut bahwa nilai indeks yang tinggi pada seseorang belum tentu memberikan jaminan akan jauh dari kemiskinan. Misalnya saja jika dilihat dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, belum dapat dipastikan bahwa mereka yang memiliki kualitas pendidikan yang baik akan hidup dengan layak dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Hal seperti inilah yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran dan akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai *coefficient* pertumbuhan ekonomi sebesar -

0,059857 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5674, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi yang ada di Indonesia, maka akan mengakibatkan penurunan pada angka kemiskinan, namun pengaruhnya tidak begitu besar. Hasil penelitian ini juga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1 miliar rupiah, maka akan ikut pula menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,059857 ribu jiwa. Hasil yang tidak signifikan dari pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan ini merupakan perwujudan dari gagalnya penerapan teori *trickle down effect* di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Diketahui pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diikuti pula dengan peningkatan ketimpangannya begitu pula dengan jumlah penduduk miskinnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan keharusan bagi pengurangan kemiskinan, namun di lain sisi pertumbuhan yang berkualitas harus efektif mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi seharusnya menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin. Oleh karena itu, pertumbuhan seharusnya dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangiuk (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Prasetyo (2020) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Usman dan Diramita (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan pendistribusian pendapatan yang merata sehingga kemiskinan akan terus meningkat.

4. Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai *coefficient* ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,082073 dengan nilai probabilitas 0,6124, artinya ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan pada ketimpangan distribusi pendapatan di 34 provinsi yang ada di Indonesia, maka akan meningkatkan angka kemiskinan, namun pengaruhnya tidak begitu besar. Hasil penelitian ini juga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sebanyak 1 rasio, maka akan ikut meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,082073 ribu jiwa. Hasil yang tidak signifikan dibuktikan dengan ketidaksesuaian antara teori dengan data yang tersedia, misalnya saja pada Provinsi Bengkulu. Pada data Gini Rasio tahun 2017 diketahui Gini Rasio Provinsi Bengkulu berada pada angka 0,349 dan meningkat menjadi 0,355 pada tahun 2018, namun peningkatan ini justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah penduduk miskin pada tahun yang sama di provinsi tersebut, yaitu 316980 ribu jiwa pada tahun 2018 dan menurun menjadi 301810 ribu jiwa pada tahun 2019. Data berikut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu diiringi dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori Kuznets bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan kondisi yang diperlukan bagi tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang artinya semakin tidak meratanya distribusi pendapatan suatu negara, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonominya karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan *aggregate saving rate* yang diikuti oleh peningkatan investasi sebagai modal pembangunan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dinilai akan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran rakyat. Hasil penelitian dan teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawati *et. al.* (2020) bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Tubaka (2019) bahwa

ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Nisa *et. al.* (2020) menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian dilakukan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana angka Gini Rasionya rendah sedangkan tingkat kemiskinan relatif tinggi.

5. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai *coefficient* tingkat pengangguran sebesar 0,0000288 dengan nilai probabilitas 0,9935, artinya pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan pada tingkat pengangguran di 34 provinsi yang ada di Indonesia, maka akan meningkatkan kemiskinan, namun pengaruhnya tidak begitu besar. Hasil penelitian ini juga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran sebanyak 1%, maka akan ikut meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,0000288 ribu jiwa. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraannya. Dilihat dari sisi individu, pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Keadaan pendapatan yang rendah bahkan tidak ada sama sekali membuat pengangguran harus mengurangi pengeluaran untuk konsumsinya. Hal ini jika dibiarkan berlanjut maka akan berdampak pada kualitas pembangunan ekonomi jangka panjang. Penurunan kesejahteraan pada pengangguran akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Hasil yang tidak signifikan disebabkan pada daerah perkotaan masyarakat cenderung rela menganggur untuk menunggu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Selain itu, banyaknya angkatan kerja yang menolak bekerja disebabkan oleh ketidaksesuaian gaji yang diharapkan. Keadaan ini disebabkan sifat masyarakat yang cenderung memilih pekerjaan sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran pada rentang usia tersebut. Namun di lain sisi, walaupun menjadi pengangguran, sebagian besar angkatan kerja yang seperti ini kehidupannya masih ditanggung oleh anggota keluarga lain yang berpenghasilan relatif tinggi, dengan demikian rata-rata pendapatan masih berada di atas garis kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gung *et. al.* (2019) bahwa pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rizal *et. al.* (2020) dimana tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Yacoub (2012) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pertumbuhan penduduk, IPM, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Tingkat pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. IPM secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4. Ketimpangan distribusi pendapatan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
5. Tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyarankan:

1. Salah satu program pengendalian penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah program KB. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, BKKBN masih mengalami beberapa kendala, seperti minimnya pengetahuan masyarakat dalam memilih alat kontrasepsi. Oleh Karena itu, penulis menyarankan agar BKKBN di 34 provinsi yang ada di Indonesia mengedukasi masyarakat tentang manfaat dari KB serta cara memilih alat kontrasepsi terbaik. Seperti halnya di masa pandemi Covid-19 ini, edukasi tentang pentingnya KB dinilai sangat penting dilakukan mengingat kekhawatiran masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di bidan maupun dokter dikarenakan terbatasnya perlengkapan tenaga kesehatan dalam mencegah penularan virus Covid-19. Selain mengendalikan angka kelahiran, dapat juga dilakukan melalui pengendalian migrasi.

2. Salah satu program yang dilakukan dalam meningkatkan IPM adalah PKH. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang kalau tidak ditangani dengan serius maka akan berdampak negatif pada IPM. Oleh karena itu penulis menyarankan agar sebaiknya penetapan rumah tangga sasaran atau calon penerima program harus diperbarui secara berkala agar penyalurannya dapat tepat sasaran dan dana yang diberikan kepada penerima program harus dipantau secara rutin agar penggunaannya dapat sesuai dengan tujuan program itu sendiri. Terlebih di masa pandemi Covid-19 pada saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) hendaknya terus mendorong masyarakat penerima manfaat PKH agar tidak kembali jatuh miskin di masa pandemi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan Bantuan Stimulan Insentif Modal (BSIMU) terhadap keluarga penerima manfaat. Melalui program ini diharapkan akan dapat mendorong usaha mikro yang nantinya dapat menggerakkan roda perekonomian. Selain melalui PKH, peningkatan IPM juga dapat dilakukan melalui peningkatan dana desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
3. Penulis mengharapkan agar pemerintah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonominya tanpa meningkatkan ketimpangan. Oleh karena itu penulis menyarankan guna keberhasilan KEK dan KI yang merupakan salah satu cara pengembangan ekonomi tanpa peningkatan ketimpangan, dibutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai sehingga semua fasilitas dapat terintegrasi, fasilitas pendukung untuk tumbuhnya industri prioritas berupa area komersil serta penelitian dan pengembangan dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, anggaran APBN dan APBD harus juga menjadi perhatian serius pemerintah. Anggaran yang besar namun tidak diimplementasikan tepat waktu dan tepat sasaran hanya akan memperburuk kondisi pembangunan daerah bersangkutan.
4. Penulis mengharapkan agar pemerintah lebih serius untuk menangani masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dengan kebijakan lebih bervisi pada kebijakan yang *pro* kemiskinan tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengurangan kemiskinan dapat juga diupayakan melalui peningkatan investasi. Selain itu, pada masa pandemi ini, pemerintah diharapkan mampu mempermudah proses perizinan usaha terutama bagi bisnis di sektor kesehatan. Hal ini dilakukan untuk merespon pesatnya minat pelaku usaha yang tinggi dalam pengajuan izin kesehatan. Selain perizinan, penulis menyarankan agar satuan petugas khusus yang dibentuk mampu berkerja maksimal untuk menarik lebih banyak investor asing serta membuat peta potensi investasi daerah yang diharapkan mampu menjadi bahan bagi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk lebih efektif dalam memasarkan investasi Indonesia kepada investor asing.
5. Penulis mengharapkan agar pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan kegiatan perluasan bagi kesempatan kerja di segala sektor dan juga jenjang pendidikan. Dengan ini, diharapkan angkatan kerja yang cenderung memilih akan mampu mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkannya. Selain itu, guna mengurangi angka pengangguran, perlu pula dilakukan peningkatan kegiatan yang bersifat pada karya melalui peningkatan infrastruktur, pelatihan bagi masyarakat juga teknologi tepat guna terutama

dimasa pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, penulis juga menyarankan agar pemerintah lebih memberikan prioritas Kartu Prakerja bagi angkatan kerja yang menjadi korban PHK, mengingat tingginya angka pengangguran sebagai akibat PHK di masa pandemi ini.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS), www.bps.go.id.
- Gung, A., Rochaida, E., Fitriadi, F. 2019. *Pengaruh Upah Minimum dan Pendidikan serta Tingkat Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Pulau Kalimantan*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 4 No. 4.
- Indrawati, I., Sarfiah, S.N., Destiningsih, R. 2020. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019*. Jurnal Dinamic Vol. 2 No. 4.
- Kotambunan, L., Palar, S.W., Tumilaar, R.L.H. 2016. *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 1.
- Mukhtar, S., Saptono, A., Arifin, A.S. 2019. *The Analysis of the Effects of Human Development Index and Opened Unemployment Levels to the Poverty in Indonesia*. Jurnal ecoplan Vol. 2 No. 2.
- Nisa, K., Wulandari, A., Rahayu, R.L. 2020. *Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018*. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 15 No.1. ISSN : 1907-364X.
- Pangiuk, Ambok. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013*. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research Vol. 2 No. 2.
- Prasetyo, Nintan. 2020. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kediri*. Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi Vol. 1 No. 2. ISSN : 2722-3361.
- Rizal, Y., Asnidar, Rahayu, S. 2020. *Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomika Vol. 4 No. 1.
- Sayifullah dan Gandasari. (Oktober 2016). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten*. Jurnal Untirta Vol. 6, No. 2. ISSN : 20894473.
- Simangunsong, S.R., Tanjung, A.A., Siahaan, S.D.N. 2021. *Analisis Dampak Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah*. Jurnal of Business and Economic Research Vol.2 No.1. ISSN : 2716-4128.
- Sukomo. 2019. *Analisis Kredit Perbankan, Belanja Publik, Pertumbuhan Penduduk, dan Ketimpangan Pendapatan Implikasinya terhadap Kemiskinan*. Jurnal Edukasi Vol. 7 No. 2. ISSN : 2355-357X.
- Sulastri, Novri. 2017. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal JOM Fekon, Vol. 4 No. 1.
- Tubaka, Saddam. 2019. *Analisis Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia*. Jurnal Cita Ekonomika Vol. 13 No. 1. ISSN : 1978-3612.
- Usman dan Diramita. 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Ekonomi Regional Unimal Vol. 1 No. 2.
- Yacoub, Yarlina. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Vol. 8 No. 3. ISSN : 1693-9093.